PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Survei Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat)

Izmavita Sarah K

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at the Department of Plantation West Java Province. The phenomenon that occurs is a problem faced in the financial statements and the physical realization of the target budget in 2013. There are still some results of activities that have not yet reached the optimal target as below target and the realization occurs more than that in the rest of the budget. Yet on the other hand there are not budgeted activity component. And if there are activities that are not budgeted and done, it must be revised budget or activity.

The purpose of this study is to determine how much influence the implementation of regional financial accounting system of local government performance and budget goal clarity on the performance of local government in Plantation Office of West Java Province.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method is used to describe the application of financial accounting system variable area, variable budget goal clarity and variable performance of local governments. To determine the effect of the application of local financial accounting system and budget goal clarity, used statistical tests. The test statistic used is designing strukural models, designing measurement models, construct the path diagram, the test model fit. Suitability test structural models and hypotheses using software SmartPLS 2.0.

The results of this study indicate that the area of financial accounting system implementation and budget goal clarity significantly positive effect on the performance of local government in Plantation Office of West Java Province.

Keywords: financial accounting systems, budget goal clarity, and government performance.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pemerintahan pusat maupun daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan (Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari:2009). Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi (Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari:2009).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Yayah Handani: 2011). Adapun sistem akuntansi keuangan daerah yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan (Yayah Handani:2011).

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai (Suhartono dan Mochammad:2006). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Suhartono dan Mochammad:2006). Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja (Suhartono dan Mochammad:2006).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Instansi Pemerintah
2. Seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas, maka maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Instansi Pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Instansi Pemerintah, dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan uji empiris. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kinerja Instansi Pemerintah, masalah-masalah pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dari konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai:

1. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Instansi Pemerintah.
2. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut salah satu pakar yaitu (Abdul Halim, 2010:34) mengatakan pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak ekstern entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan. Sedangkan menurut (Darise, 2009: 41) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Berdasarkan pada UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta

pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja Instansi Pemerintah menurut (Chabib Soleh dan Suripto, 2011:5) di bagi menjadi enam bagian sebagai berikut:

1. Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang;
2. Untuk menemukan kembali SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai factor penyebab keberhasilan dan kekurangberhasilan dari setiap SKPD;
3. Untuk membangkitkan motivasi kerja Kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif;
4. Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi;
5. Melalui laporan kinerja, Pemerintah Daerah meninformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada para pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada pemerintah tingkat diatasnya;
6. Meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat,bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dengan Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut (Mardiasmo, 2009:84) mengemukakan hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan keinerja Instansi Pemerintah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Serta menurut (Mardiasmo, 2008:147-148) menyatakan Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai.

2.2.2 Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut (Mardiasmo, 2009:63) mengemukakan hubungan antara Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja yaitu anggaran merupakan instrumen akuntabilitas kinerja atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas kinerja publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Serta menurut (Anthony et. all, 2012:25) mengemukakan hubungan antara Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja bahwa anggaran berhubungan dengan

kinerja yang tercapai karena merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi, Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:32), objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah,kejelasan sasaran anggaran dan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perkebunan Jawa Barat.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:2). Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2011:47), pengertian metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.3 Desain Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010:30), desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, dari perencanaan sampai dan pelaksanaan penelitian.

Unit analisis/elemen yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. *Time horizon* yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross sectional.* Menurut Uma Sekaran (2006:177), studi *one shoot* atau *cross sectional* adalah sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.4 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Narimawati (2010:31) adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengujuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas atau Independent
   Menurut Sugiyono (2010:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
   Variabel independen pada penelitian ini adalah Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan *Self Asssessment System* (X_2).
2. Variabel terikat atau dependent
   Menurut Sugiyono (2010:40), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
   Variabel dependent dalam hal ini adalah Kinerja instansi pemerintah.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan *(library reserach).* Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*):
   a. Wawancara (Interview)
      Menurut Umi Narimawati (2010:40) , wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
   b. Kuesioner
      Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistic. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.6 Metode Penarikan Sampel

Populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Dinas Perkebunan Jawa Barat yang berjumlah 90.126.

Menurut Umi Narimawati (2010:38), sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin*, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + \mathrm{N}\ e^2}$$

Sumber: Umi narimawati (2010:38)

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%,10%)

Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mepunyai usaha pada Dinas Perkebunan Jawa Barat sebanyak 100 wajib pajak.

3.7 Metode Pengujian Data

3.7.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif
   Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.
2. Analisis Data Verifikatif
   Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0.* Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18), *Partial Least Square* (PLS) merupakan merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari yang dilakukan dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan jawaban kuesioner dari responden yang berkaitan dengan variable penelitian yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah.

4.1.1 Pengujian Alat Ukur

1. Hasil Pengujian Validitas
   Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya dengan kata lain untuk melihat apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner telah mengukur tujuan

dari variabel yang diteliti. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya ≥ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari kritis 0,30, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas
   Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel). Berdasarkan Nilai koefisien reliabilitas untuk mesing-masing variabel seperti terlihat pada tabel di atas lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tepat, dapat dipercaya (reliable) dan konsisten. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kepada 40 responden secara berulang-ulang dalam waktu berbeda *(range)* 2 minggu.

4.1.2 Analisis Deskriptif Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang sistem akuntansi keuangan daerah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, penulis mendeskripsikan hasil tanggapan responden dengan melihat nilai rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas tiga indikator variabel sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil rekapitulasi jumlah skor dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Pencatatan	159	200	79,5%	Cukup
2	Penggolongan dan pengikhtisaran	154	200	77,0%	Cukup
3	Pelaporan	174	200	87,0%	Baik
	Total	487	600	81,2%	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pernyataan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Pada tabel di atas dapat dilihat total skor tanggapan responden untuk ketiga indikator dari sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh sebesar 487 (81,2%).

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 487 (81,2%) berada di antara interval 80 – 100. Besaran skor penilaian tidak mencapai 100% yang diharapkan sehingga antara tingkat ideal yang diharapkan dengan kondisi aktual masih terdapat gap (perbedaan) sebesar 18,8%. Artinya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada umumnya sudah diterapkan dengan baik, namun gap sebesar 18,8% menunjukkan bahwa masih terdapat masalah atau kekurangan pada sistem akuntansi keuangan daerah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

4.1.3 Analisis Deskriptif Kejelasan sasaran anggaran

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang kejelasan sasaran anggaran di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, penulis mendeskripsikan hasil tanggapan responden dengan melihat nilai rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas tiga indikator

variabel kejelasan sasaran anggaran. Hasil rekapitulasi jumlah skor dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Kuantitatif	164	200	82,0%	Baik
2	Formal	131	200	65,5%	Cukup
3	Sistematis	136	200	68,0%	Cukup
	Total	431	600	71,8%	Cukup

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pernyataan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Pada tabel di atas dapat dilihat total skor tanggapan responden untuk ketiga indikator dari kejelasan sasaran anggaran diperoleh sebesar 431 (71,8%).

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 431 (71,8%) berada di antara interval 60 – 80. Besaran skor penilaian tidak mencapai 100% yang diharapkan sehingga antara tingkat ideal yang diharapkan dengan kondisi aktual masih terdapat gap (perbedaan) sebesar 28,2%. Artinya kejelasan sasaran anggaran di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun gap sebesar 28,2% menunjukkan bahwa masih terdapat masalah atau kekurangan dalam kejelasan sasaran anggaran di Dinas Perkebunan Jawa Barat.

4.1.4 Hasil Deskriptif Kinerja instansi pemerintah

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, penulis mendeskripsikan hasil tanggapan responden dengan melihat nilai rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas lima indikator variabel kinerja Instansi Pemerintah. Hasil rekapitulasi jumlah skor dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.22
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kinerja Instansi Pemerintah

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Memperjelas tujuan organisasi	140	200	70,0%	Cukup
2	Mengevaluasi target akhir	132	200	66,0%	Cukup
3	Menunjukkan standar kinerja	141	200	70,5%	Cukup
4	Menunjukkan efektivitas	148	200	74,0%	Cukup
5	Menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling efisien untuk mencapai sasaran	162	200	81,0%	Cukup
	Total	723	1000	72,3%	Cukup

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pernyataan×Nilai tertinggi×Jumlah Responden
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Pada tabel di atas dapat dilihat total skor tanggapan responden untuk kelima indikator dari kinerja Instansi Pemerintah diperoleh sebesar 723 (72,3%).

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 723 (72,3%) berada di antara interval 60 – 80. Besaran skor penilaian tidak mencapai 100% yang diharapkan sehingga antara tingkat ideal yang diharapkan dengan kondisi aktual masih terdapat gap (perbedaan) sebesar 27,7%. Artinya kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada umumnya sudah

berjalan dengan cukup baik, namun gap sebesar 27,7% menunjukkan bahwa masih terdapat masalah atau kekurangan dalam kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Jawa Barat.

4.1.5 Hasil Analisis Verifikatif

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS 2.0*, maka hasil analisis verifikatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil nilai *Composite Reliability* (C-R) untuk 3 indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1) tersebut sebesar 0,875. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki konsisten yang tinggi terbentuk dari 3 indikatornya.
2. Hasil nilai *Composite Reliability* (C-R) untuk 3 indikator kejelasan sasaran anggaran (X_2) diperoleh sebesar 0,861. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten kejelasan sasaran anggaran memiliki konsisten yang tinggi terbentuk dari 3 indikatornya.
3. Hasil nilai *Composite Reliability* (C-R) untuk 5 indikator kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh sebesar 0,901. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomndasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten kinerja Instansi Pemerintah (Y) memiliki konsisten yang tinggi terbentuk dari 3 indikatornya.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Hasil nilai $t\text{-}_{hitung}$ variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Instansi Pemerintah diperoleh sebesar 2,744. Nilai t_{hitung} lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ maka disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

Besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Instansi Pemerintah adalah (0,335×0,335×100%) = 11,3%. Jadi sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh 11,3% terhadap kinerja Instansi Pemerintah jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan.

Sedangkan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah secara tidak langsung terhadap kinerja Instansi Pemerintah karena adanya hubungan dengan kejelasan sasaran anggaran sebesar (0,335×0,448×0,580×100%) = 8,7%. Besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Instansi Pemerintah sebesar 20,0%.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh *Kejelasan sasaran anggaran* Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Hasil nilai $t\text{-}_{hitung}$ variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah diperoleh 4,459. Nilai t hitung lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ maka disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

Besarnya pengaruh langsung kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah adalah (0,580×0,580×100%) = 33,6%. Jadi kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh 10,7% terhadap kinerja Instansi Pemerintah jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan. Sedangkan pengaruh kejelasan sasaran anggaran secara tidak langsung terhadap kinerja Instansi Pemerintah karena adanya hubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah (0,580×0,448×0,335×100%) = 8,7%. Besarnya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah diperoleh sebesar 42,3%.

3. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 20,0% terhadap kinerja Instansi Pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh sebesar 42,3% terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Secara total keduanya sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh sebesar 62,3% terhadap kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Dari hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Instansi Pemerintah diperoleh nilai $t\text{-}_{hitung}$ sebesar 2,744. Nilai t_{hitung} lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ (2,744 > 1,96) maka disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Jawa Barat.

Fenomena yang terjadi yaitu sistem akuntansi keuangan daerah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, terutama dalam proses pencatatannya masi terdapat masalah, kurang baiknya laporan keuangan atau anggaran Instansi Pemerintah (LKPD) hal ini dilihat dari hasil pemeriksaan, dapat menjadi indikasi kurang kredibelnya pengelolaan keuangan daerah. Dalam 24 Laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota yang diperiksa pada tahun 2007, tujuh diantaranya mendapat opini disclaimer, Selebihnya 16 kabupaten/kota yang lain mendapat opini wajar dengan pengecualian, dalam hal ini dapat dilihat sebagai tindakan penyusunan LKPD yang belum melalui prosedur akuntansi serta tidak memiliki kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, dan kurangnya keterbukaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (Slamet Kurniawan:2012).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan yaitu indikator sistem akuntansi keuangan daerah yang berasal dari tanggapan responden paling rendah adalah penggolongan dan pengikhtisaran dengan persentase total skor aktual sebesar 77,0% dengan gap sebesar 23,0% yang berarti sebesar 23,0% respoden memang berpendapat merasa masih ada kekurangan di dalam proses penggolongan dan pengikhtisaran. Hal ini juga dibuktikan melalui kuisioner, dimana sebesar 10 orang responden menjawab ketepatan pencatatan transaksi keuangan selama ini cukup sesuai dengan bukti yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh sebesar 11,3% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai korelasi sebesar 0,335 yang berarti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif walaupun rendah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Profinsi Jawa Barat. Arah hubungan positif penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja Instansi Pemerintah menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang optimal akan diikuti dengan kinerja Instansi Pemerintah baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 11,3% (rendah) terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya 11,3% tersebut dapat dijelaskan dari analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil deskriptif membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai skor tanggapan responden sebesar 81,2% dan termasuk dalam kategori baik yang artinya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah cukup mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator pelaporan dengan persentase skor aktual sebesar 87,0%, selanjutnya indikator pencatatan dengan persentase skor aktual sebesar 79,5% dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator penggolongan dan pengikhtisaran dengan persentase skor aktual sebesar 77,0%. Terdapat gap dari analisis deskriptif sebesar 18,8% dan itulah yang merupakan masalah yang ada pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Selanjutnya kinerja Instansi Pemerintah mempunyai skor tanggapan responden sebesar 72,3% dan masuk dalam kategori cukup baik, yang artinya kinerja Instansi Pemerintah pada

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah Menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling efisien untuk mencapai sasaran dengan persentase skor aktual sebesar 81,0%, selanjutnya indikator Menunjukkan efektivitas dengan persentase skor aktual sebesar 74,0%, kemudian indikator Menunjukkan standar kinerja dengan persentase skor aktual sebesar 70,5%, kemudian indikator Memperjelas tujuan organisasi dengan persentase skor aktual sebesar 70,0%, dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Mengevaluasi target akhir sebesar 66,00%.

Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari variasi data masing-masing variabel, kemungkinan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah adalah sedikit. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah hanya 11,3%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperhatikan faktor penggolongan dan pengikhtisaran (0,863) dengan menambah pengetahuan SDM tentang pedoman-pedoman akuntansi yang benar, kemudian faktor pencatatan (0,802) dengan cara lebih teliti lagi didalam proses pencatatan, dan yang terakhir adalah memperbaiki faktor pelaporan (0,844) dengan cara lebih memperhatikan proses pencatatan dan penggolongan maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang reliabel.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang optimal dengan memperhatikan proses pencatatan yang sesuai dengan pedoman, dan proses penggolongan dan pengikhtisaran yang sesuai dengan *chart of account* nya serta proses pelaporan yang lebih terbuka lagi. akan meningkatkan tingkat Kinerja Instansi Pemerintah pada pegawai Dinas Perkebunan Jawa Barat.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut (Mardiasmo, 2009:84). Sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan berdasakan kinerja yang di capai, pelaksanaan sistem menggambarkan bagaimana kinerja Instansi Pemerintah dalam menunjukan pencapaian hasil yang dicapai pada pemerintahan daerah tersebut (Maryana:2011).

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran, hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kinerja Instansi Pemerintah. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka masalah pada kinerja Instansi Pemerintah dapat diselesaikan. Tidak ada jaminan bahwa akan terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana, oleh karena itu pemerintahan perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja, penilaian pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam pencapaia kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Wawan Sukmana dan lia Anggarsari:2009).

4.2.2 Analisis Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Dari hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah diperoleh nilai $t\text{-}_{hitung}$ sebesar 24,606. Nilai t_{hitung} lebih besar

dari t_{kritis} (24,606 > 1,96) maka disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Jawa Barat.

Fenomena yang terjadi bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya dapat melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan. Seperti daya serap anggaran lamban dan ketidaktaatan terhadap aturan formal (Samsudi:2014), Lambannya daya serap anggaran berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran program dan angka pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Direktorat jenderal perbendaharaan yang menggambarkan bahwa ternyata hingga 30 Agustus 2013 lalu, realisasi penyerapan anggaran belanja negara baru mencapai 54,8 persen dari Rp1.726,2 triliun sebagaimana yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (ABPN-P) untuk Tahun Anggaran 2014, (Paskah Suzetta:2014), Terkait dengan masalah kejelasan sasaran anggaran, Anggota Komisi E DPRD Jabar menyoroti program ruang kelas baru (RKB) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Implementasi RKB di lapangan kurang tepat sasaran, adanya partai politik yang menerima dana RKB dan LSM melaporkan partai-partai tertentu yang menerima dana RKB, dalam distribusinya di temukan perbedaan data yang mencolok yakni data yang diajukan ke pusat tidak sesuai dengan realisasi dilapangan. Oleh karena itu, pihaknya kini tengah mengevaluasi kemungkinan adanya unsur politis yang bisa menggeser alokasi dana RKB ke pihak lain (Humar Dani:2013).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan yaitu indikator kejelasan sasaran anggaran yang berasal dari tanggapan responden paling rendah adalah formal dengan persentase total skor aktual sebesar 65,5% dengan gap sebesar 34,5% yang berarti sebesar 34,5% respoden memang berpendapat merasa masih ada kekurangan di dalam implementasi aturan formal. Hal ini juga dibuktikan melalui kuisioner, dimana sebesar 29 orang responden menjawab kesesuaian aturan formal dalam merealisasikan anggaran selama ini dengan undang-undang dan peraturan pengelolaan anggaran masi dalam kategori cukup sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh sebesar 10,7% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai korelasi sebesar 0,580 yang berarti kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh positif walaupun rendah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Profinsi Jawa Barat. Arah hubungan positif kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja Instansi Pemerintah menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang optimal akan diikuti dengan kinerja Instansi Pemerintah baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh sebesar10,7% (rendah) terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya 10,7% tersebut dapat dijelaskan dari analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil deskriptif membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai skor tanggapan responden sebesar 71,8% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang artinya kejelasan sasaran anggaran cukup mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator kuantitatif dengan persentase skor aktual sebesar 82,0%, selanjutnya indikator sistematis dengan persentase skor aktual sebesar 68,0% dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator formal dengan persentase skor aktual sebesar 65,5%. Terdapat gap dari analisis deskriptif sebesar 28,2% dan itulah yang merupakan masalah yang ada pada kejelasan sasaran anggaran.

Selanjutnya kinerja Instansi Pemerintah mempunyai skor tanggapan responden sebesar 72,3% dan masuk dalam kategori cukup baik, yang artinya kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah Menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling efisien untuk mencapai sasaran dengan persentase skor aktual sebesar 81,0%, selanjutnya indikator Menunjukkan efektivitas dengan persentase skor aktual sebesar 74,0%, kemudian indikator Menunjukkan standar kinerja dengan persentase skor aktual sebesar 70,5%, kemudian indikator Memperjelas tujuan organisasi dengan persentase skor aktual sebesar 70,0%, dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Mengevaluasi target akhir sebesar 66,00%.

Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari variasi data masing-masing variabel, kemungkinan kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah adalah sedikit. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah hanya 10,7%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada kejelasan sasaran anggaran dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperhatikan faktor kuantitatif (0,756) dengan memperjelas rencana anggaran serta tujuan akan kemana anggaran akan disalurkan, kemudian faktor formal (0,835) dengan cara memberi sosialisasi serta pelatihan kepada pengelola anggaran terkait dengan aturan formal, dan yang terakhir adalah memperbaiki faktor sistematis (0,868) dengan cara meningkatkan kedisiplinan dalam merealisasikan anggaran.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, dimana kejelasan sasaran anggaran yang optimal dengan memperhatikan kuantitas dalam anggaran serta penerapan aturan formal yang disiplin dan tepat sasaran dan sistematis anggaran yang tersusun dengan baik akan meningkatkan tingkat Kinerja Instansi Pemerintah pada pegawai Dinas Perkebunan Jawa Barat.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada (Mardiasmo:2009).

Penelitian yang sama juga menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bila semakin jelas sasaran anggarannya maka semakin mudah untuk mempertanggungjawabkannya (Anjarwati:2012). Hal ini sejalan dengan penelitian lain yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kusumaningrum:2010).

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran, hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kinerja Instansi Pemerintah. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kejelasan sasaran anggaran, maka masalah pada kinerja Instansi Pemerintah dapat diselesaikan. Terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran (Kenis dalam Andarias, 2009).

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis dapat membuat kesimpulan berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh terhadap kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Pengaruh yang diperoleh relatif kecil. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan dan pelaporan terlihat sudah baik namun belum optimal dan dalam penggolongan dan pengikhtisaran masih belum baik dan dinilai lebih rendah dari dua hal lainnya yaitu pencatanan dan pelaporan.
2. Kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh terhadap kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat meskipun besaran pengaruhnya relatif besar. kejelasan sasaran anggaran dinilai masih belum optimal dimana permasalahan yang ada seperti ketidaktaatan terhadap aturan formal berkaitan dengan pengalokasian dana yang tidak digunakan sesuai tujuan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat lebih optimal dan tepat sasaran maka dalam penggolongan akun yang telah dicatat sebaiknya disesuaikan dengan pedoman *chart of account*. Dengan membuat nomor perkiraan tertentu pada akun-akun sehingga memudahkan dalam proses penggolongan dan pencatatan. Serta lebih disesuaikan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan agar dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.
2. Agar terciptanya akuntabilitas kinerja yang transparan dan baik kepada masyarakat perlu adanya kejelasan sasaran anggaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka sebaiknya perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyajian secara jujur dengan mencatat dan menulis transaksi yang terjadi harus dicatat sepenuhnya sesuai dengan fakta dan penggunaan dana yang diatur secara efektif dan efisien sehingga output yang dihasilkan kedepannnya tidak disalah gunakan.

5.2.2 Saran Akademi

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar dipeoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

Daftar Pustaka

Ahyari, Agus, 2008. *Anggaran Perusahaan 1: Pendekatan Kuantitatif*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, BPFE, Yogyakarta.

Anthony et all, 2012. Akuntansi Manajemen, Edisi ke 5 Jilid 2, Terjemahan Bahasa Indonesia. Jakarta : PT. Indeks.

Arikunto, S., 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical psychology*. John Wiley & Sons Ltd England.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta.

Chairul Marom, 2002, *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*, Edisi ke-dua, Penerbit Grasindo, Jakarta.

Cooper. W. W, Seiford, L.M. & Tone, K. 2006. *Data Envelompment Analysis*. Boston. MA : Kluwer Academic Publishers.

Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta

Darsono P dan Ari Purwanti. 2008. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wancana Media.

Dharma, Agus. 2003. *Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dharmanegara, Ida Bagus Agung. 2010. *Penganggaran Perusahaan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ghozali, Imam. 2006. Structural *Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hair et al. 1995. *Multivariate Data Analysis, (5th Edition*). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Halim, A, Damayanti, T. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sari Bunga Rampai: Yogyakarta.
Halim, Abdul dan Theresia. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi kedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Husein, Umar. 2003. *Evaluasi Kinerja Karyawan*. CetakanKedua. Jakarta : PT. Sun.

Indrianto, Nur. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Indriantoro Nur,. Supomo,Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis,* Penerbit : BPFE Yogyakarta.

Jogiyanto,HM. 2005, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, ANDI, Yogyakarta.

Kabo.Y.R. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi, CV Andi Offset. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Mulyadi. 2001, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.

Narimawati,Umi. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Genesis : Bekasi.

Narimawati, Umi. 2010. *Metode penelitian: Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Narimawati,Umi.,Anggadini Dewi Sri.,Ismawati Lina. 2011. *Penulisan Karya Ilmiah*. Unikom. Genesis, Bandung.

Dedi Nordiawan dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, D,& Hertianti, A. 2011. *Akutansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Soedarmayanti. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. RafikaAditama.

Soleh, Chabib dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Jatinangor: FOKUSMEDIA.

Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keduabelas. Bandung: Alfabeta 153.

Sugiyono. 2011, *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Kesembilan belas. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Jilid 2.* Jakarta: Salemba Empat.

Supangat, Andi. 2008. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Parametrik*. Jakarta: Kencana Prenada

Susanto, Azhar. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

Susanto, Azhar. 2007, *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.

Ulum, Ihyaul M.D. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Umar Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein. 2009. *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta: Rajawali.

Umar Sekaran. 2006. *Metodologi Peneltian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Veithzal Rivai & Ahmad Fawzi Mohd Basri. 2005. *Performance Appraisal Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Warren Reeve Fess, 2005, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, Buku dua, Edisi 21.

Yang. Keifeng & Miller, Gerald J. 2008. *Handbook of Research Methods in Public Administration Taylor & Francis* Group: CRC Press U.S.

Referensi Jurnal :

Abdul Rohman. 2007, Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Maksi Vol7 No.2 ISSN: 1412-6680.

Abdul Rohmah. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No. 1:21-32. (16 Februari 2011).

Askam Tuasikal. 2008. Pengaruh pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. (Studi pada kabupaten dan kota provinsi maluku). ISSN:1410-8623.

Bangun, Andarias. 2009, Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dengan Internal control Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi kasus pada Pemerintah Kabuppaten Deli Serdang), Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, Terpublikasi.

Mei Anjarwati. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ISSN: 2252-6765.

Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. ISSN:1907 – 9958.

Yayah Handani. 2011. Implementasi sistem akuntansi Keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah terhadap pengawasan dan kinerja pemerintah daerah–Jurnal Akuntansi dan bisnis Vol, 9 no 1 Febuari 2009 21.

Referensi artikel:
http://www.bpk.go.id/news/kpk-harus-tindak-lanjuti-temuan-bpk-di-dinkes
http://www.pikiran-rakyat.com/node/77782?page=7

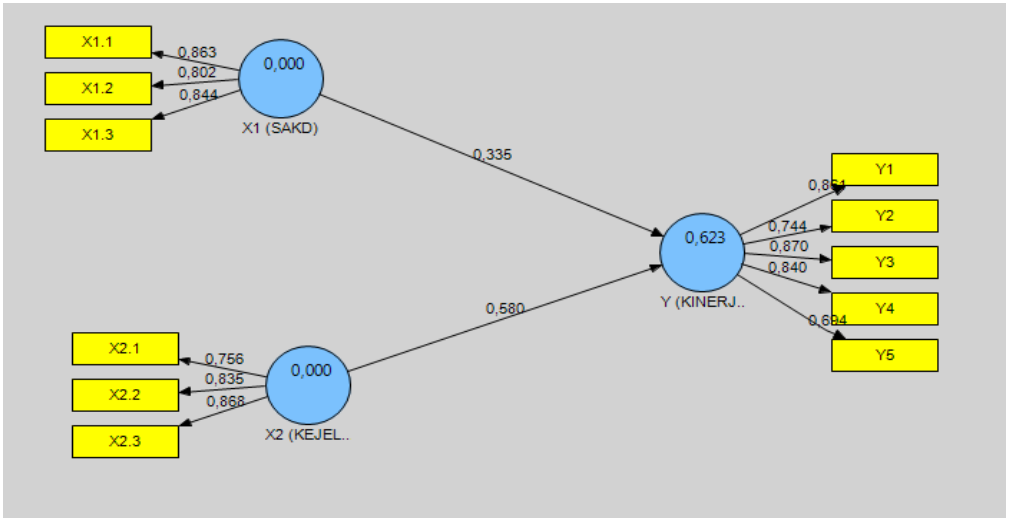
http//www.detikNews.com/Rendahnya-Penyerapan-Anggaran-DKI-Berbanding-Lurus-dengan-Kinerja.htm

http://www.bappenas.go.id/files/7113/5230/0985/minimalkan-akrobat-anggaran-dengan-pengawasan-efektif__20081123212415__1306__0.pdf

http://www.pikiran-rakyat.com/node/190565

Referensi lainnya:
Mendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 70: ayat 1
Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 23:ayat 1
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
UU RI. No 17 Tahun 2003
UU No.23 Tahun 2994. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
UU 33 Tahun 2004. Sumber-sumber keuangan Negara

LAMPIRAN
Koefisien Jalur Struktural



PLS BOOTSRAPING
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (|O/STERR|)
X1 (SAKD) -> Y (KINERJA)	0,335478	0,342357	0,122273	0,122273	2,743687
X2 (KEJELASAN SA) -> Y (KINERJA)	0,579747	0,582887	0,130007	0,130007	4,459337

Nilai t hitung

